



**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)**

Rina Madyasari
Universitas Cipasung
Email : rinamadyasari@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to see the direct influence of financial performance variable in the form of independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio of economic growth, unemployment and poverty, to see the direct impact of economic growth on poverty unemployment, and to see the direct impact of unemployment on poverty. The method used was case study. Data in this research is secondary data including Realization Report of Revenue and Expenditure Budget (APBD), the rate of economic growth, the rate of unemployment and the rate of poverty in Tasikmalaya cities starting from 2008 until 2013. This research using statistics descriptif and path analysis of research variable. The result of the research showed that financial performance namely of independence ratio have positive significant effect on economic growth, while the effectiveness ratio and efficiency ratio have negative effect on economic growth. Independence ratio also have negative effect on unemployment and poverty, while the effectiveness ratio and efficiency ratio have positive effect on unemployment and poverty. Economic growth gives negative effect in unemployment, while gives positive effect on poverty. Unemployment gives significant effect on poverty.

Keyword : financial performance, economic growth, poverty, unemployment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh langsung variabel kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, untuk melihat pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan serta untuk melihat pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan pada Kota Tasikmalaya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya mulai tahun 2008 sampai tahun 2013. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio efektifitas dan rasio efisiensi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Kemandirian juga memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Rasio efektifitas dan rasio efisiensi memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan



ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan, serta pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci : kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan

PENDAHULUAN

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No. 58 tahun 2005, pasal 4). Tolak ukur kinerja anggaran belanja dalam suatu organisasi termasuk Pemerintah Daerah adalah *value for money* yakni efisiensi, efektivitas dan ekonomis (Bastian, 2001). Efisien berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2002).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2006). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan (Nanga, 2005) serta menurunkan tingkat kemiskinan, dimana kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang baik itu kebutuhan makan maupun non makan (BPS, 2008).

Dalam teori *fiscal federalism* dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002), yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi, 2011). Aristovnik (2012) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu: (i) otonomi fiskal pemerintah daerah, dan (ii) pentingnya fiskal pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem pemerintahan terdesentralisasi, pemerintah daerah akan dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, dkk., 2009). Penthury (2011) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal, karena infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Modebe *et al.* (2012).



Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah cenderung mendorong terjadinya marginalisasi dan peningkatan permasalahan sosial. Hal ini selain akibat dari partisipasi angkatan kerja yang rendah dan lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang semakin bertambah. Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di perkotaan. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, namun persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, akhirnya mendorong terjadinya kesenjangan antar sektor pertanian dan industri, antar desa dan kota. Daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya cenderung rendah. Hal ini berkaitan dengan adanya daerah-daerah yang pesat pertumbuhan penduduknya, namun penduduk usia kerja yang ada belum terserap dalam sektor pekerjaan yang berkembang di wilayah tersebut. Di lain pihak pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkorelasi negatif dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tidak berkorelasi nyata dengan penurunan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan *familiar* bagi masyarakat umum. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan dari daerahnya itu sendiri tanpa memandang kenaikan itu besar atau kecil. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana, mengupayakan pemerataan kesempatan kerja dan yang lainnya. Jika hal ini berlangsung terus maka daerah-daerah lain ikut terpacu untuk berkembang dan memajukan daerahnya, (Wahyu, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier untuk melakukan analisis jalur (*path analysis*) terhadap variabel-variabel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Garis Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sensus atau *sampling* jenuh. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Garis Kemiskinan Kota Tasikmalaya tahun 2008-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data juga diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Kota Tasikmalaya

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Kota Tasikmalaya



Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun	Pendapatan (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	(%)
	Target	Realisasi		
2008	607.484.462.000,00	617.040.309.495,61	9.555.847.495,61	101%
2009	656.395.387.000,00	709.019.451.793,19	52.624.064.793,19	108%
2010	823.160.158.000,00	829.347.403.378,70	6.187.245.378,70	101%
2011	916.055.793.000,00	915.696.936.770,03	(358.856.229,97)	100%
2012	1.067.473.778.151,00	1.061.433.837.805,00	(6.039.940.346,00)	99%
2013	1.350.407.419.111,00	1.365.593.492.674,06	15.186.073.563,06	101%
Jumlah	4.813.492.535.262,00	4.881.091.122.420,98	67598587158,98	101%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 6 tahun, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah dari tahun 2008 sebesar Rp. 617.040.309.495,61 atau 101,57% dari target yang ditetapkan, kemudian naik pada tahun 2009 sebesar Rp. 709.019.451.793,19 atau 108% dari target yang ditetapkan, kemudian meningkat di tahun 2010 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 829.347.403.378,70 atau 101% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2012 pemerintah kota Tasikmalaya hanya dapat merealisasikan 99% pendapatan dari target yang ditetapkan, namun demikian besarnya nominal jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2012 meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan hanya terjadi pada persentase antara target dan realisasi. Sampai dengan tahun 2013 realisasi pendapatan Kota Tasikmalaya selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1.365.593.492.674,06 atau 101% dari target yang ditetapkan.

Analisis Kemandirian

**Tabel 2. Rasio Tingkat Kemandirian Kota Tasikmalaya
Tahun 2008-2013**

Tahun	Keterangan			
	PAD	Penerimaan Daerah	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan
2008	65.715.623.638,61	617.040.309.495,61	10,65	Sangat Rendah
2009	76.503.523.370,19	709.019.451.793,19	10,79	Sangat Rendah
2010	104.787.914.974,70	829.347.403.378,70	12,63	Sangat Rendah
2011	110.369.865.905,03	915.696.936.770,03	12,05	Sangat Rendah



2012	153.009.410.135,00	1.061.433.837.805,00	14,42	Sangat Rendah
2013	172.883.279.898,06	1.365.593.492.674,06	12,66	Sangat Rendah
Rata-Rata	113.878.269.653,60	916.355.238.652,77	12,20	Sangat Rendah

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014

Kota Tasikmalaya dengan rasio kemandirian daerah rata-rata dalam enam tahun terakhir yaitu tahun 2008- 2013 yang mencapai 12,20% mengintrepetasikan pola kemandirian yang masih instruktif. Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah daerah kota Tasikmalaya dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer kota Tasikmalaya yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat-lainnya, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, transfer pemerintah propinsi, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainya yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2008-2013. Berdasarkan hasil analisis data yang tersaji pada tabel diatas pada dasarnya pendapatan transfer daerah kota Tasikmalaya didominasi oleh perolehan transfer pemerintah pusat atau yang sering disebut sebagai dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Analisis Efektifitas

**Tabel 3. Rasio Efektifitas Pendapatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2008-2013**

Tahun	Keterangan		Rasio Efektifitas (%)
	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	
2008	65.715.623.638,61	58.684.055.000,00	111,98
2009	76.503.523.370	69.337.990.000	110,33
2010	104.787.914.974	95.412.668.000	109,83
2011	110.369.865.905	104.897.749.000	105,22
2012	153.009.410.135	137.853.811.629	110,99
2013	172.883.279.898	170.101.109.996	101,64
Rata-Rata	113.878.269.653,44	106.047.897.270,83	108,33

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014

Dari tabel perhitungan rasio efektifitas diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008-2013 rasio efektifitas keuangan daerah kota Tasikmalaya yang rata-rata mencapai 108,33% dapat dikatakan efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



selama enam tahun terakhir, Kota Tasikmalaya dapat mengefektifkan realisasi PAD yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan baik.

Analisis Efisiensi

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Kota Tasikmalaya
Tahun 2008-2013**

Tahun	Keterangan		
	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2008	687.947.280.646,19	709.019.451.793,19	97,03
2009	687.947.280.646	709.019.451.793	97,03
2010	880.339.919.311	829.347.403.378	106,15
2011	917.531.043.950	915.696.936.770	100,20
2012	1.035.028.120.491	1.061.433.837.805	97,51
2013	1.311.030.641.333	1.365.593.492.674	96,00
Rata-Rata	919.970.714.396,20	931.685.095.702,20	98,99

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2013 menggambarkan bahwa Kota Tasikmalaya masuk dalam kategori efisien dengan rata-rata 98,99%. Komponen dari total belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Uji Regresi dengan Metode *Path Analysis*

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 5. Persamaan Regresi Model I
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,167	,438		16,362	,004
	Rasio Kemandirian	,042	,009	,628	4,578	,045



Rasio Efektifitas	-,009	,003	-,399	-2,689	,115
Rasio Efisiensi	-,009	,004	-,367	-2,472	,132

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics 21*

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7,167 + 0,042 X_1 - 0,009 X_2 - 0,009 X_3$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 7,167 diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi ketika variabel eksogen seperti kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_1 sebesar 0,042 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio kemandirian (variabel X_1) sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,42% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b_2 sebesar -0,009 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X_2) sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Sementara itu, koefisien regresi linear b_3 sebesar -0,009 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi (variabel X_3) sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian regresi antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,042 dengan signifikansi sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau dengan kata lain penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hasil ini berarti bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan secara statistik signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,009 dengan signifikansi sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target penerimaan PAD belum memenuhi ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merealisasikan penerimaannya jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan belum maksimal sehingga rasio efektifitas belum mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,009 dengan signifikansi sebesar 0,132 lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini



dikarenakan realisasi belanja yang dikeluarkan belum cukup mampu dialokasikan untuk belanja modal. Dengan belum efisiennya penggunaan anggaran belanja modal maka belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian antara kinerja keuangan terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Persamaan Regresi Model II
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6,200	18,823		-,329	,773
1 Rasio Kemandirian	-,714	,395	-,640	-1,808	,212
Rasio Efektifitas	,099	,148	,258	,672	,571
Rasio Efisiensi	,125	,154	,312	,814	,501

a. Dependent Variable: Pengangguran

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics* 21

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -6,200 - 0,714 X_1 + 0,099 X_2 + 0,125 X_3$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar -6,200 diartikan sebagai pengangguran ketika variabel independen seperti kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_1 sebesar -0,714 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio kemandirian (variabel X_1) sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 71,4% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b_2 sebesar 0,099 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X_2) sebesar 1% akan meningkatkan pengangguran sebesar 9,9% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Sementara itu, koefisien regresi linear b_3 sebesar 0,125 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi (variabel X_3) sebesar 1% akan meningkatkan pengangguran sebesar 12,5% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian hipotesis antara kinerja keuangan terhadap pengangguran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,714 dengan signifikansi sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05, maka $H_{a.2}$ ditolak. Ini berarti bahwa rasio kemandirian tidak



berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan pada sektor riil PAD yang ditunjang dari pembayaran pajak dan retribusi, dimana daerah memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang seharusnya mampu meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi ternyata kurang berkembang dengan baik, yang menyebabkan kecilnya sumbangan PAD terhadap pendapatan sehingga kurang atau tidak menyerap jumlah pengangguran.

- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,099 dengan signifikansi sebesar 0,571 lebih besar dari 0,05, maka $H_{a.2}$ ditolak. Ini berarti bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan pada pengangguran. Hal ini dikarenakan oleh realisasi penerimaan daerah dari yang ditargetkan tidak terlalu besar atau adanya kesenjangan anggaran dalam penyusunan anggaran, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan program-program yang dapat dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efisiensi terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,125 dengan signifikansi sebesar 0,501 lebih besar dari 0,05, maka $H_{a.2}$ ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan pada pengangguran. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah dalam penggunaan belanja daerah lebih besar pada alokasi belanja operasi dari pada alokasi belanja modal. Sehingga penerimaan yang seharusnya dialokasikan untuk membuat lapangan pekerjaan yang lebih banyak hanya mampu digunakan untuk membiayai belanja operasi dan menutupi kekurangan yang disebabkan oleh banyaknya pengeluaran daerah, sehingga hal tersebut tidak dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian antara kinerja keuangan terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 7. Persamaan Regresi Model III
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemiskinan**

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-12,620	12,687		-,995	,425
	Rasio Kemandirian	-1,599	,266	-,691	-6,010	,027
	Rasio Efektifitas	,474	,100	,591	4,761	,041
	Rasio Efisiensi	,018	,104	,022	,175	,877

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics 21*



Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -12,620 - 1,599 X_1 + 0,474 X_2 + 0,018 X_3$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar -12,620 diartikan sebagai kemiskinan ketika variabel independen seperti kinerja keuangan berupa rasio kemnadirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_1 sebesar -1,599 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio kemandirian (variabel X_1) sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan 1,599 sebesar 159,9% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b_2 sebesar 0,474 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X_2) sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 47,4% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Sementara itu, koefisien regresi linear b_3 sebesar 0,018 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi (variabel X_3) sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 1,8% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian hipotesis antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian terhadap kemiskinan menunjukkan nilai yang negatif sebesar -1,599 dengan signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05, maka $H_{a.3}$ diterima. Ini berarti bahwa rasio kemandirian berpengaruh secara signifikan pada tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan semakin besarnya sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas terhadap kemiskinan menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,474 dengan signifikansi sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05, maka $H_{a.3}$ diterima. Ini berarti bahwa rasio efektifitas berpengaruh secara signifikan pada kemiskinan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya selama enam tahun terakhir selalu melebihi target yang ditetapkan sehingga telah efektif untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah Kota Tasikmalaya.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efisiensi terhadap kemiskinan menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,018 dengan signifikansi sebesar 0,877 lebih besar dari 0,05, maka $H_{a.3}$ ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi dari pada belanja modal. Hal tersebut menyebabkan kurang efisiennya pengeluaran yang dilakukan pemerintah sehingga tidak dapat digunakan untuk membantu meningkatkan program-program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Realisasi penerimaan pemerintah daerah belum mampu atau belum teralokasi pada peningkatan program-program untuk menanggulangi kemiskinan seperti belum adanya gerakan pembangunan desa terpadu, belum mendorong permodalan untuk UMKM yang ada di wilayah kota Tasikmalaya sehingga belum mampu mengurangi kemiskinan.



Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Persamaan Regresi Model IV
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84,366	29,644		2,846	,047
	Pertumbuhan Ekonomi	-13,117	5,115	-,789	-2,564	,062

a. Dependent Variable: Pengangguran

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics 21*

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_2 = 84,366 - 13,117 Y_1$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 84,366 diartikan sebagai pengangguran ketika variabel independen pertumbuhan ekonomi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_1 sebesar -13,117 menyatakan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi (variabel Y_1) sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 13,117 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian hipotesis antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar -13,117 dan signifikasinya 0,062 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat berarti telah terjadi kenaikan terhadap produksi barang dan jasa karena kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Kenaikan permintaan terhadap tenaga kerja ini akan berakibat terhadap menurunnya tingkat pengangguran. Begitu sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi turun berarti telah terjadi penurunan terhadap produksi barang dan jasa karena penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Penurunan permintaan terhadap tenaga kerja ini akan berakibat terhadap meningkatnya tingkat pengangguran.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya



Berdasarkan hasil pengujian antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 9. Persamaan Regresi Model V
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	199,114	45,841		4,344	,012
	Pertumbuhan Ekonomi	-30,723	7,910	-,889	-3,884	,018

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics 21*

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_3 = 199,114 - 30,723 Y_1$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 199,114 diartikan sebagai kemiskinan ketika variabel eksogen pertumbuhan ekonomi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_1 sebesar -30,723 menyatakan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi (variabel Y_1) sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 30,723 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian hipotesis antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar -30,723 dan signifikasinya 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 maka $H_{a.5}$ diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan menurun sebesar 30,723%. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi semakin berkurang tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil pengujian antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 9. Persamaan Regresi Model VI
Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,943	4,315		1,377	,241
	Pengangguran	1,811	,509	,872	3,556	,024

a. Dependent Variable: Kemiskinan



Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS *Statistics* 21

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_3 = 5,943 + 1,811 Y_2$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 5,943 diartikan sebagai kemiskinan ketika variabel independen pengangguran adalah nol. Nilai koefisien regresi linear b_2 sebesar 1,811 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengangguran (variabel Y_2) sebesar 1% akan menaikkan kemiskinan sebesar 1,811 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian hipotesis antara pengangguran terhadap kemiskinan dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pengangguran menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar 1,811 dan signifikasinya 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 maka $H_{a.6}$ diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif pengangguran terhadap kemiskinan. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap pengangguran sebesar 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan meningkat sebesar 1,811%. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Uji Validitas Model

Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis jalur (*path analysis*) yaitu koefisien determinan total dan *trimming theory*. Untuk koefisien determinan total merupakan total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang diukur dengan :

$$Rm^2 = 1 - P_{e1}^2 \cdot P_{e2}^2 \cdot P_{e3}^2$$

Dimana :

$R2m$ = total keragaman data

P_{e1}^2 = nilai kuadrat residu pada pertumbuhan ekonomi

P_{e2}^2 = nilai kuadrat residu pada pengangguran

P_{e3}^2 = nilai kuadrat residu pada kemiskinan

Maka koefisien determinannya:

$$Rm^2 = 1 - (0,09)^2 \times (0,603 + 0,378)^2 \times (0,064 + 0,21 + 0,24)^2$$

$$= 1 - (0,0081) (0,962361) (0,264196)$$

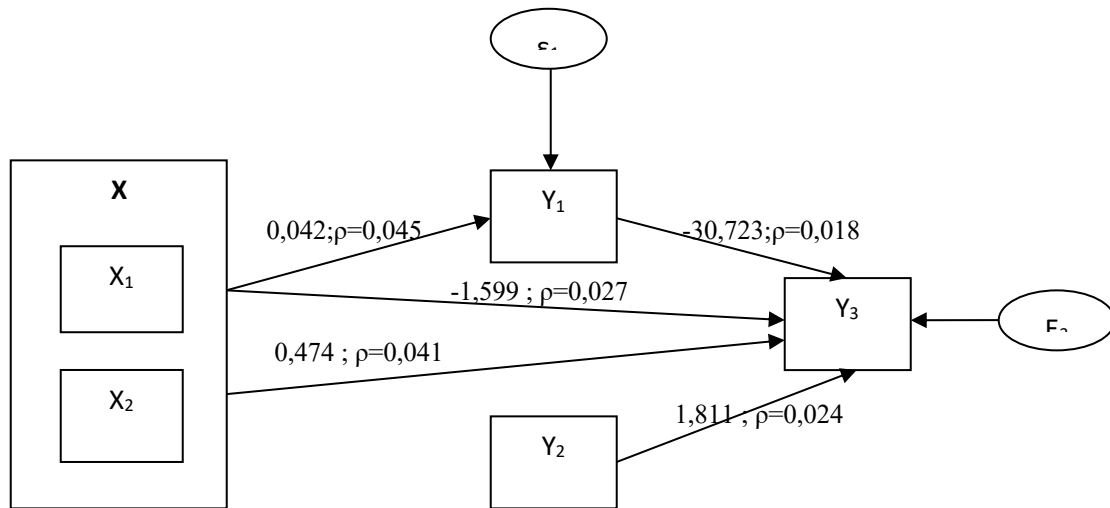
$$= 1 - 0,002059$$

$$= 0,997941 \text{ atau } 99,79\%$$

Besarnya Rm^2 sebesar 99,79% artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 99,79% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 99,79% dapat dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan

sisanya sebesar 0,2059% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan teori *trimming*, maka jalur-jalur yang tidak signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik. Adapun model dalam bentuk diagram jalur berdasarkan teori *trimming* adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Jalur Persamaan Substruktur

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut

Tabel 10. Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung, dan Pengaruh Total X_1 , X_2 Terhadap Y_1 dan Y_3

Pengaruh Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung (Melalui Y_1)	
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,042	-	0,042
$X_1 \rightarrow Y_3$	-1,599	-1,29	2,889
$X_2 \rightarrow Y_3$	0,474	-	0,750
$Y_1 \rightarrow Y_3$	-30,723	-	-30,723
$Y_2 \rightarrow Y_3$	1,811	-	1,811

Sumber : Data diolah, 2014



Berdasarkan Tabel 10 di atas, diperoleh informasi bahwa :

1. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif sebesar 0,042. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio kemandirian secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pada pengaruh tidak langsung rasio kemandirian ke kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar $0,042 \times -30,723 = -1,29$. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
3. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif sebesar -1,599. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio kemandirian secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Kinerja keuangan berupa rasio efektifitas berpengaruh positif sebesar 0,474. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio efektifitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5. Pengangguran berpengaruh positif sebesar 1,811. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
3. Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian dan rasio efektifitas secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efisiensi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
5. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
6. Pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.



Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diajukan secara khusus bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah harus lebih dioptimalkan dari pada pemerintah pusat agar lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kebijakan yang akan diambil dapat diaplikasikan dengan baik, serta akan berdampak positif terhadap Kota Tasikmalaya pada tahun berikutnya.
2. Pemerintah diharapkan dapat cepat mengambil langkah dengan melihat kontribusi yang dihasilkan pada variabel-variabel di dalam penelitian yang lebih menekankan pada kemandirian, efektifitas dan efisiensi daerah apabila ingin menekan pengangguran serta kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Kebijakan yang diberikan pemerintah daerah ialah kebijakan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan daerah. Dalam hal ini sangat berpengaruh di bidang keuangan daerahnya, sebab keuangan daerah yang diolah secara baik akan mendukung potensi daerah yang dimilikinya. Kebijakan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan juga untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPF.
- , 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- , 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Ni Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan



Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014):481-497.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wahyu, Arief. 2013. Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten Se Jawa Tengah Periode 2007-2009). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.